



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I KETUT KARIYASA
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 548286

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.939.525.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 222 m ² /42 m ² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.510.000.000		
2. Tanah Seluas 2250 m ² di KAB / KOTA BULENG, HASIL SENDIRI Rp. 347.500.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m ² /100 m ² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m ² /100 m ² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000		
5. Tanah Seluas 3900 m ² di KAB / KOTA BULENG, HASIL SENDIRI Rp. 258.375.000		
6. Tanah Seluas 1111 m ² di KAB / KOTA BULENG, HASIL SENDIRI Rp. 186.650.000		
7. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m ² /56 m ² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 637.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	284.300.000
1. MOTOR, YAMAHA N MAX NON ABS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA BAEROXBP Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 22.300.000		



3. MÓBIL, HONDA CRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.	
250.000.000	
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp. 195.584.840
D. SURAT BERHARGA	Rp. 448.925.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp. 646.108.388
F. HARTA LAINNYA	Rp. —
Sub Total	Rp. 5.514.443.228
III. HUTANG	Rp. 242.561.114
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp. 5.271.882.114

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://lhkpnn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diliis dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.